

Strategi Pembentukan Tambrauw Sebagai Kabupaten Konservasi Di Papua

Sepus M Fatem^{1*}, San Afri Awang², Ahmad Maryudi² Satyawan Pudyatmoko², Jonni Marwa³, Devi Manuhua³ & Salmon Lembang³

^{1,2}Fakultas Kehutanan UGM Jogjakarta; Email: sepusfatem@yahoo.com

^{1,3}Fakultas Kehutanan Universitas Papua, Jl. Gunung Salju Amban, Manokwari Papua Barat

ABSTRAK

Tambrauw merupakan kabupaten di Papua Barat yang menempatkan kebijakan konservasi sebagai domain pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan merancang strategi bagi pembentukan Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi. Penelitian berlangsung sejak bulan oktober-November 2017, menggunakan pendekatan SWOT untuk analisis kekuatan dan kelemahan (faktor Internal) dan peluang dan ancaman (faktor eksternal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tambrauw layak sebagai Kabupaten Konservasi, dimana posisinya berada pada kwadran I. Artinya bahwa terdapat kekuatan dan peluang sebagai faktor kunci pembentukan kabupaten Konservasi. Kelayakan sebagai kabupaten konservasi juga terlihat melalui hasil analisis faktor internal dan eksternal, dimana Tambrauw dimungkinkan menjadi kabupaten konservasi dengan nilai evaluasi faktor internal 3.20 dan eksternal sebesar 2.75. Meskipun faktor kelemahan dan keterancaman memiliki potensi cukup besar, namun melalui 4 pilihan strategi yang ditetapkan diyakini akan membantu pemerintah Kabupaten Tambrauw memperkecil ancaman dan kelemahan dimaksud.

Kata kunci: Kabupaten konservasi; Strategi Pembentukan, Tambrauw

ABSTRACT

Tambrauw regency of West Papua province, has been placing conservational policy as domain of the regional development. This study is intended to design a strategy for establishing Tambrauw as a Conservation Region. This research was conducted from October to November 2017, by employing SWOT analysis to analyse strength and weaknesses (internal factors), and opportunity and threats (external factors). The results show that the quadran I of Tambrauw regency is decent to become a Conservation Region which means that it has potential and opportunity for the establishment of Conservation Region. The feasibility of becoming a conservation region can be seen through the results' analysis of internal and external factors with the evaluation value of 3.20 and 2.75, respectively. Despite a considerable weaknesses and threats elements, these issues could be minimized by implementing four chosen schemes by the Government of Tambrauw.

Key words: Conservation Regency; Establishment strategy; Tambrauw

Citation: Fatem, S. M., Awang, S. A., Maryudi, A., Pudyatmoko, S., Marwa, J., Manuhua, D., dan Lembang, S. (2019). Strategi Pembentukan Tambrauw Sebagai Kabupaten Konservasi Di Papua. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(2),373-387, doi:10.14710/jil.17.2.373-387

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Istilah hutan konservasi di Indonesia merujuk pada suatu kawasan hutan yang diproteksi atau dilindungi. Proteksi atau perlindungan tersebut bertujuan untuk melestarikan hutan dan kehidupan yang ada didalamnya agar bisa menjalankan fungsinya secara maksimal. Titik awal sejarah konservasi di Indonesia dimulai sejak kongres ke 3 Taman Nasional dan kawasan yang dilindungi sedunia pada oktober 1982 di Bali (Mackinnon *et al*

1993). Bersamaan dengan kongres tersebut, pemerintah Indonesia mendeklarasikan 11 taman nasional (Soemarwoto, 2004). Era ini menjadi tonggak awal dikenalkannya taman nasional di Indonesia, namun masih mengadopsi pola pengelolaan dari Taman Nasional Yellowstone, yang mengedepankan pendekatan pengamanan (*security approach*) dengan mengutamakan kepentingan konservasi diatas segalanya (Jepson dan Whittaker, 2002)

Pengertian hutan konservasi menurut Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok

pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri dari: Kawasan Hutan Suaka Alam (KSA) berupa Cagar Alam, dan Suaka Margasatwa; Kawasan Hutan Pelestarian Alam (KPA) berupa Taman Nasional, Taman Hutan Raya (Tahura) dan Taman Wisata Alam (TWA) dan taman buru. Kawasan Hutan Suaka Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Papua, sejak tahun 1990 menjadi tonggak awal gerakan konservasi dimulai. Diduga kuat bahwa pembentukan kawasan konservasi di wilayah ini tidak terlepas dari potensi Papua sebagai salahsatu wilayah tropis terbesar keragaman hayati dan budaya yang tinggi di dunia (Petocz 1989; Wikramanayake 2001). Berbagai usulan penetapan kawasan konservasi ini mendapat pengaruh dari berbagai aktor internasional seperti IUCN, WWF dan CI.

1.2. Rumusan Masalah

Tambrauw merupakan Kabupaten pemekaran di Papua Barat sejak tahun 2008 dengan luas wilayah 11.529,182 Km² terletak di bagian utara wilayah Kepala Burung utara Provinsi Papua Barat. Wilayah ini merupakan kabupaten dengan kawasan hutan yang sangat luas dengan proporsi hutan konservasi dan hutan lindung hingga 80 % sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 783/II/2014 tentang peta fungsi hutan Provinsi Papua Barat (Bappeda Tambrauw, 2014).

Disisi lain, secara budaya dan adat istiadat, Pegunungan Tambrauw merupakan rumah tradisional suku-suku asli dan pusat peradaban "*Pendidikan Inisiasi Wuon* " sebagai praktek konservasi alam secara tradisional di kepala burung Papua. Hubungan ini bersifat timbal balik bahkan mistik dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan ketradisional, sehingga hutan dansegala isinya sangat dijaga dan dihargai eksistensinya oleh suku asli. Dengan wilayah yang luas, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, keragaman budaya dan penghidupan masyarakat yang hidup didalamnya, Tambrauw menjadi bagian di Papua yang menantang untuk dikelola dalam rangka mewujudkan manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Fakta diatas mendorong pemerintah Daerah terus berupaya untuk menemukan bentuk pengaturan pengelolaan sumber daya alam yang baik, berkelanjutan dan bermanfaat yang terintegrasi melalui tata kelola pemerintahan. Oleh sebab itu Kabupaten konservasi menjadi

pilihan politik dimana telah tertuang dalam misi kelima yakni Menjaga Lingkungan dengan menetapkan Tambrauw sebagai kabupaten konservasi (Asem *et al*, 2013; Bappeda Tambrauw 2014; Fatem dan Asem, 2015; Fatem et all 2018).

Kabupaten Konservasi adalah wilayah administrasi pemerintahan yang melaksanakan pembangunan mengacu upaya pelestarian, perlindungan serta pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistem (Kartodiharjo, 2005). Definisi ini kemudian dikembangkan dengan pengertian yakni sebuah tatakelola pemerintahan adaptif yang melaksanakan pembangunan bertumpu pada upaya konservasi aspek sosial- budaya, ekonomi dan ekologi (Fatem, 2018). Kebijakan ini akan mewajibkan sebuah kerangka kerja pemerintah yang mendukung mata pencaharian lokal, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, dan melindungi keanekaragaman hayati yang signifikan secara global, serta jasa ekosistem (termasuk penyerapan karbon).

Komitmen Kabupaten Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi memberikan peluang yang strategis bagi pemerintah daerah, provinsi maupun pusat untuk memastikan agar pengelolaan sumberdaya alam sebagai modal pembangunan dapat diselenggarakan secara berkelanjutan serta memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat, terutama masyarakat adat antar generasi.

Meskipun komitmen politik pemerintah Kabupaten Tambrauw cukup tinggi, namun munculah pertanyaan lanjutan sejauh mana daerah memiliki strategi dalam mengimplementasikan kebijakan kabupaten konservasi tersebut. Berdasarkan argumentasi dan fakta diatas, maka dipandang perlu dilakukan penelitian guna menganalisis faktor-faktor kunci apa saja yang paling berpengaruh dari semua aspek yang ada untuk mengembangkan Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi.

1.3. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis faktor internal dan faktor eksternal yang berpotensi berpengaruh terhadap pembentukan Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi
2. Menyusun strategibagi pembentukan Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi

2. Metodologi Penelitian

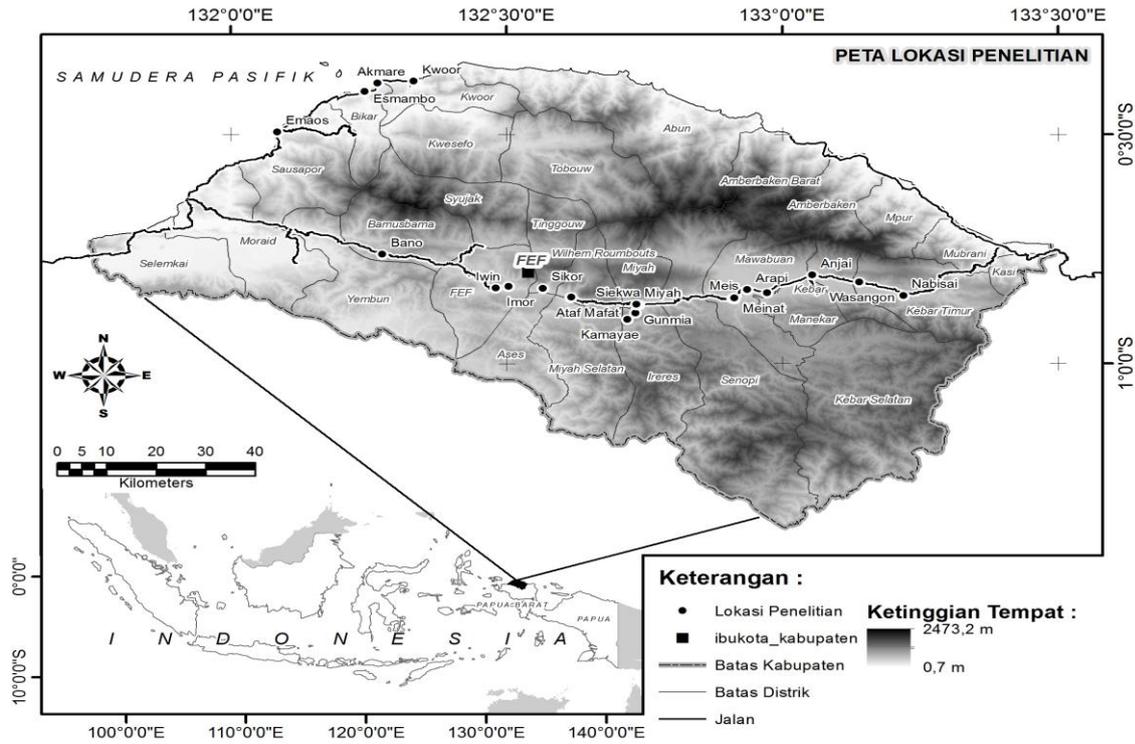
2.1. Lokasi dan Waktu

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Tambrauw, Povinsi Papua Barat, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1. Sedangkan penelitian dilakukan dari Bulan Oktober - Desember 2017. Kampung dan distrik pengambilan data tersaji pada gambar 1 peta.

Pengambilan data dilakukan di pada 76 responden dari 11 kampung dari 7 distrik di Kabupaten Tambrauw.

2.2. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah kebijakan Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi. Sedangkan subjek penelitian dapat dilihat pada tabel 1.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Tabel 1. Jumlah Responden Penelitian

Kelompok	Jumlah Responden
Masyarakat adat	40 orang
PNS (Provinsi/kabupaten Tambrauw/Akademisi)	30 orang
Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO)	6 orang
Jumlah	76 orang

1.1. Pengumpulan dan Analisis Data

Data yang di kumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara semi struktural dan pengamatan lapangan. Data tersebut antara lain: Databiofisik kawasan, sarana dan prasarana pendukung, persepsi masyarakat dan manfaat

sosial-ekonomi. Sedangkan data sekunder berupa dokumen diperoleh dari instansi pemerintah di Kabupaten Tambrauw yang berkaitan dengan Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi, seperti; Profil Kabupaten Tambrauw, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Tambrauw 2012-2016; analisis program-program kerja Pemerintah Kabupaten

Tambrauw yang berkaitan dengan adanya Kabupaten Konservasi serta analisis program kerja LSM/NGO yang berada di Kabupaten Tambrauw. Pengambilan data wawancara dilakukan pula di beberapa OPD Provinsi Papua Barat, BBKSDA Papua Barat dan Akademisi Fakultas Kehutanan Unipa Manokwari, sebagaimana tersaji pada lampiran 1. Data yang

dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik SWOT. Analisis SWOT merupakan proses yang sebelum direncanakan terlebih dahulu merinci keadaan lingkungan internal dan eksternal guna mengetahui faktor-faktor yang merupakan kunci keberhasilan kedalam kategori kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).

2. Hasil dan Pembahasan

2.1. Evaluasi Faktor Kunci

Kabupaten Tambrauw merupakan kabupaten yang sangat strategis untuk upaya konservasi sumberdaya alam, perlindungan sistem budaya dan adat maupun adaptasi dan mitigasi perubahan iklim global. Dalam upaya mewujudkan Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi, maka identifikasi faktor kunci (*critical factor*) sangat penting dilakukan. Faktor-faktor kunci itu, baik internal utama dan

eksternal utama meliputi: Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threat*) (Nur Sumedi *et al.*2012). Dalam penelitian, diperoleh 7-10 faktor eksternal dan internal pembentukan Kabupaten konservasi. Selanjutnya dari faktor-faktor tersebut, dilakukan perhitungan untuk melihat total nilai bobot (TNB). Dari total nilai bobot tersebut, ditentukan 3 faktor kunci keberhasilan (FKK) internal berdasarkan nilai tertinggi TNB dimaksud. Lampiran 2.

Tabel 2. Evaluasi Faktor Internal (EFI) Pembentukan Kabupaten Konservasi

Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor (Bobot x Rating)
Kekuatan			
Luas wilayah 77% Kawasan konservasi	0.30	4	1.20
Komitmen Politik Pemerintah Daerah melalui visi dan misi Pemerintah	0.30	4	1.20
Tingginya potensi wisata yang dapat dikelola menjadi objek wisata	0.10	4	0.40
Kelemahan			
Pengetahuan masyarakat & OPD masih kurang terkait Kabupaten Konservasi.	0.10	1	0.10
Kelembagaan adat belum terstruktur baik.	0.10	2	0.20
Kurangnya pengawasan dan kontrol BBKSDA terhadap aktivitas ilegal.	0.10	1	0.10
	1.00		3.20

Sumber: Hasil Olahan data Primer, 2018

Dari faktor kunci yang diidentifikasi, terdapat 3 faktor utama sebagai "Evaluasi Faktor Internal " Ketiga faktor tersebut antara lain: luas kawasan konservasi sekitar 77 %, komitmen politik yang kuat melalui visi-misi pembangunan daerah, potensi wisata sebagai sumber PAD Kabupaten. Sementara 3 faktor internal yang menjadi kelemahan antara lain; rendahnya pengetahuan aparat OPD dan masyarakat tentang kebijakan Kabupaten Konservasi, kelembagaan adat belum terstruktur baik serta rendahnya kontrol dan pengawasan dari BBKSDA Papua Barat terhadap kawasan konservasi. Nilai hasil evaluasi EFI menunjukkan nilai 3.20. Meskipun terdapat faktor kelemahan dalam proses pembentukan Kabupaten

Konservasi, namun dapat tertutupi oleh faktor kekuatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa faktor internal sangat mendukung pembentukan Tambrauw Sebagai Kabupaten Konservasi yang ditunjukkan dengan nilai 3.20. Hasil identifikasi faktor internal dan eksternal dalam penelitian diperoleh 7-10 faktor eksternal dan internal yang terkait erat dengan pengembangan Tambrauw sebagai Kabupaten konservasi. Tahap berikutnya dilakukan perhitungan untuk melihat total nilai bobot (TNB) dari faktor-faktor eksternal tersebut. Selanjutnya, ditentukan 3 faktor kunci keberhasilan (FKK) berdasarkan nilai tertinggi TNB dimaksud.

Tabel 3. Evaluasi Faktor Eksternal (EFE) pembentukan Kabupaten Konservasi

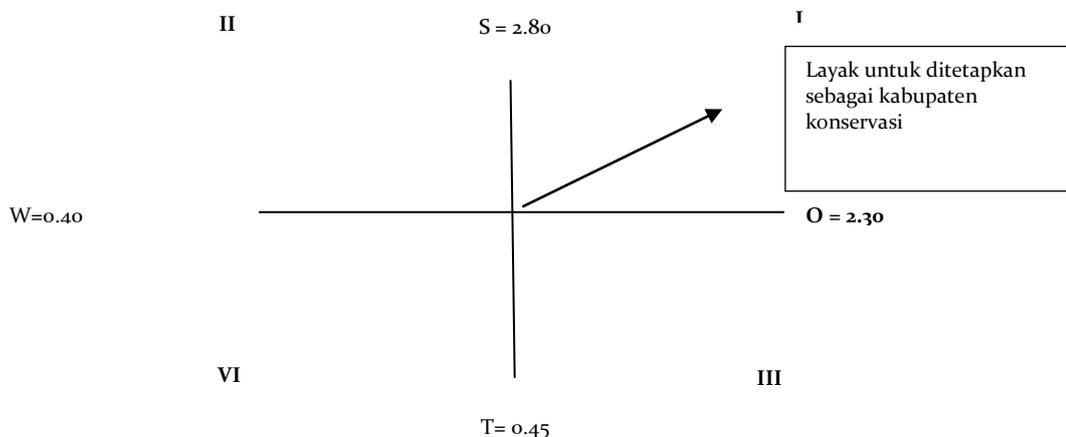
Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor (Bobot x Rating)
Peluang			
Menjadi destinasi wisata di Papua Barat.	0.35	4	1.40
Adanya kebijakan pembuatan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan)	0.20	3	0.60
Menambah pendapatan daerah dari sektor pariwisata.	0.10	3	0.30
Ancaman			
Degradasi kearifan lokal akibat Era-globalisasi.	0.05	2	0.10
Berubah-ubahnya kebijakan pemerintah pusat-daerah.	0.05	2	0.10
Pencurian Satwa Liar dan tumbuhan dari oleh pihak luar.	0.25	1	0.25
	1,00		2.75

Hasil Olahan data Primer, 2018

Hasil EFE menunjukkan nilai 2.75 (Tabel 2). Nilai tersebut dibawah EFI yang memperoleh nilai 3, 20. Berdasarkan nilai tersebut dapat dikatakan bahwa pembentukan Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi akan memperoleh manfaat optimal dari peluang, meski memiliki keterancaman yang dihadapinya. Kondisi ini berarti bahwa faktor ancaman dapat ditutupi melalui optimalisasi faktor-faktor peluang pembentukan kabupaten Konservasi. Dinamika lingkungan eksternal berupa pengembangan potensi wisata, menguatnya kebijakan pengelolaan hutan melalui skema kesatuan Pengelolaan Hutan -Konservasi (KPH-Konservasi) serta kabupaten konservasi menjadi destinasi wisata di Papua Barat akan berpotensi meningkatkan manfaat dari pembentukan Tambrauw sebagai kabupaten konservasi serta memperkecil faktor -faktor keterancaman. Lebih lanjut Fatem dan Asem (2014) mengatakan bahwa dua strategi pembentukan

Kabupaten Konservasi dilakukan melalui strategi adaptasi dan strategi optimalisasi. Strategi optimalisasi dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dimana konsep investasi *hijau* menjadi leading sector. Salah satunya adalah sektor pariwisata di Kabupaten Tambrauw yang sementara dikembangkan. Sementara strategi adaptasi dilakukan melalui integrasi kebijakan Kabupaten Konservasi kedalam dokumen perencanaan daerah yakni RPJMD Kabupaten Tambrauw 2017-2022, Rencana Strategik (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) setiap organisasi perangkat daerah.

Selanjutnya dari hasil analisis nilai faktor internal (3.20) dan eksternal (2.75) tersebut, kemudian dipetakan sesuai tipe masing-masing yaitu *strength, weaknesses, opportunities dan threats* dalam peta posisi kekuatan internal-eksternal dan di peroleh pembentukan Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi.



Gambar 2. Hasil Peta Posisi Kuadran

	<p>Kekuatan (Strengths)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komitmen Politik Pemerintah Daerah dalam visi dan misi. • Luas wilayah 77% merupakan Kawasan konservasi. • Potensi wisata yang dapat dikelola menjadi objek wisata. 	<p>Kelemahan (Weaknesses)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan masyarakat & OPD masih kurang terkait kabupaten konservasi. • Kelembagaan adat yang belum terstruktur. • Kurangnya pengawasan dan kontrol BBKSDA terhadap kawasan konservasi.
<p>Peluang (Opportunities)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan pendapatan daerah dari sektor pariwisata. • Adanya kebijakan pembangunan KPH (Kesatuan pengelolaan Hutan-Konservasi). • Berpotensi menjadi destinasi parawisata. 	<p>Strategi S-O</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan peran dan fungsi OPD strategis guna memenuhi komitmen pemerintah daerah dalam pembentukan Tambrau sebagai kabupaten konservasi. • Mengoptimalkan aneka fungsi hutan melalui unit manajemen kecil yakni KPH-K (KPH) Konservasi • Pengembangan objek wisata lokal sebagai destinasi wisata bertaraf nasional dan internasional 	<p>Strategi W-O</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas (pengetahuan, sikap, persepsi) SDM aparatur sipil negara maupun masyarakat adat tentang Kabupaten Konservasi melalui sosialisasi, seminar maupun diseminasi. • Melakukan penataan kelembagaan pemerintah dan kelembagaan adat dalam mendukung implementasi Kabupaten konservasi. • Peningkatan pengawasan dan kontrol BBKSDA sekitar kawasan konservasi yang berpotensi menjadi destinasi wisata, agar kelestarian dan ekosistemnya dapat terjaga
<p>Ancaman (Threat)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencurian Satwa dan tumbuhan oleh pihak luar • Berubah-ubahnya kebijakan pemerintah pusat. • Degradasi kearifan lokal akibat era-globalisasi. 	<p>Strategi S-T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat regulasi terkait pelarangan perburuan illegal tumbuhan dan satwa liar di Kabupaten Tambrau. • Meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui skema perhutanan sosial maupun kebijakan lokal di Tanah Papua melalui perencanaan, masukan, proses, dan luaran. • Mendorong upaya perlindungan adat-budaya serta optimalisasi peran adat dan nilai budaya melalui festival, pesta rakyat, dll. 	<p>Strategi W-T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi kebijakan Tambrau Sebagai Kabupaten Konservasi kepada aparat sipil negara (ASN), masyarakat lokal dan lainnya. • Penguatan kelembagaan pemerintah daerah, Penguatan lembaga adat serta penyiapan kapasitas masyarakat adat agar mampu beradaptasi terhadap dinamika dan perubahan kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya alam guna mendukung misi kabupaten Konservasi • Peningkatan pengawasan BBKSDA dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan kawasan berbasis kearifan lokal dan menerapkan bina cinta alam kepada masyarakat adat.

Gambar 3. Matrik SWOT Pengembangan Tambrau Sebagai Kabupaten Konservasi

Gambar 2. dengan jelas memperlihatkan bahwa nilai S dan O sangat besar dibandingkan W dan T. Dengan demikian pencaanangan dan pembentukan Tambrauw sebagai kabupaten konservasi dapat dilaksanakan dengan melihat strategi dari hasil analisis SWOT tersebut. Khususnya nilai internal dan eksternal terlihat bahwa nilai internal lebih besar dibandingkan dengan nilai eksternal dan berada pada kuadran I. Artinya situasi yang menguntungkan, untuk menjadikan Tambrauw sebagai kabupaten konservasi sehingga dapat memanfaatkan formulasi rumusan strategi SO, WO, ST dan WT. Strategi ini pada prinsipnya saling berkaitan antara faktor-faktor internal dan eksternal dalam mendukung pembentukan Tambrauw sebagai kabupaten konservasi.

2.2. Analisis SWOT

Pembentukan Tambrauw sebagai Kabupaten konservasi tentunya memiliki keterkaitan erat dengan dengan factor-faktor pemungkin. Faktor pemungkin ini bersifat lokal dan menjadi pilar utama strategis bagi terbentuknya Kabupaten Konservasi. Untuk itu dalam penelitian ini, dilakukan identifikasi SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*). Adapun langkah-langkah analisis SWOT sebagai berikut: Mengidentifikasi faktor-faktor strategis Kabupaten Konservasi, Meingidentifikasi kekuatan (S), Kelemahan (W), Peluang (O), dan ancaman (T) dari hasil pengamatan yang dilakukan. Dari hasil identifikasi, dipilih 12 unsur yang dianggap penting dari setiap komponen SWOT. Selanjutnya untuk menentukan strategi yang akan dijalankan, maka dilakukan dengan membuat matriks gabungan dari keempat komponen SWOT. Dari hasil matriks gabungan, ditentukan strategi dalam kelompok umum (SO, WO, ST, dan WT), yang selanjutnya akan terjabarkan dalam bentuk yang lebih spesifik (Rangkuti, 2005 dalam Aprilia Kukuh *et al.* 2016).

2.3. Formulasi Strategi

Formulasi strategi pembentukan Kabupaten Tambrauw Sebagai Kabupaten Konservasi dilakukan menggunakan matriks SWOT. Formulasi strategi adalah langkah penyusunan alternatif strategi pembentukan Kabupaten Konservasi. Tahap ini sering disebut sebagai *matching stage*. Pada tahap ini dilakukan pencocokan terhadap faktor internal dan eksternal untuk menemukan strategi yang

tepat. Matriks SWOT digunakan pada tahap ini. Perumusan strategimenghasilkan empat alternatif, yaitu Strategi Strength-Opportunity (Strategi SO), Strategi Strength -Threath (Strategi ST), Strategi Weakness-Opportunity (Strategi WO), dan Strategi Weakness-Threath (Strategi WT). Hasil perumusan strategi dengan menggunakan Matriks SWOT ditunjukkan pada gambar 2 diatas. Secara rinci formulasi strategi dimaksud djabarkan dibawah ini:

Strategi S-O (Strength and Opportunities)

- a. Mengoptimalkan komitmen politik pemerintah daerah untuk menjadikan Tambrauw sebagai kabupaten konservasi agar dapat menambah pendapatan daerah dengan cara evaluasi program kerja dari OPD terkait. Dinas Pariwisata Kabupaten Tambrauw, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pemberdayaan Masyarakat maupun Badan Perencana dan Pembangunan Daerah Tambrauw dapat menginventaris potensi-potensi wisata yang berada di Kabupaten Tambrauw, dan menyusun program untuk dikembangkan sebagai objek daya tarik wisata di Kabupaten Tambrauw. Menurut informan 34, 62 dan 64, dibutuhkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama lintas OPD baik program fisik dan non fisik sesuai tugas organisasi perangkat daerah dalam mengembangkan destinasi wisata di Kabupaten Tambrauw. Wisata berbasis kelestarian ekologi dan sosial (ekowisata) saat ini semakin luas dikenal sebagai salah satu daya tarik ekonomi yang menguntungkan dan terus dipromosikan secara gencar dalam upaya konservasi hutan hujan tropis (Purwanto, 2014). Promosi wisata dapat dilakukan melalui 3 aspek yang dikenal dengan istilah triple A (Atraksi, Amenitas, and Aksesibilitas). Produk wisata dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dijual sebagai komoditas pariwisata. Atraksi wisata terdiri dari potensi flora, fauna, bentang alam dan atraksi buatan berupa seni dan budaya masyarakat (Muttaqin *et a*, 2011)
- b. Mengoptimalkan luas kawasan konservasi di Kabupaten Tambrauw melalui peluang pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Berdasarkan SK.783/Menhut-II/2014 luas kawasan Kabupaten Tambrauw 1,199,962 Ha dan 77,039,172 Ha adalah kawasan konservasi jika dipersentasikan sekitar 77-80 % adalah kawasan konservasi, maka dibutuhkan unit manajemen kecil untuk mengelolanya. Wawancara dengan informan 1 dan 2, terungkap bahwa KPH Konservasi sangat mungkin dibentuk di kabupaten Tambrauw

dengan pertimbangan potensi luasan areal konservasi. Implementasi KPH sebenarnya sudah sesuai dengan komitmen negara untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari yang telah diatur (UU 41/1999, PP 44/2004, PP 6/2007 jo 3/2008). KPH adalah organisasi yang mewakili entitas kawasan ditingkat lapangan untuk menjamin peningkatan kepastian kawasan dan terselenggaranya keberlanjutan tata kelola kawasan untuk produksi hasil hutan (kayu dan non kayu), penyerapan karbon, ekowisata maupun kesejahteraan masyarakat (Suryandari dan Sulfiani, 2012). Tidak hanya skema KPH-K, namun, pemerintah telah mengeluarkan Permen LHK Nomor 83 tahun 2016 tentang perhutanan sosial dan Permen LHK 43/2017 tentang pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan suaka alam dan pelestarian alam. Dengan demikian, ruang bagi pemberdayaan masyarakat adat sebagai bagian dari manajemen kawasan konservasi dalam mendukung Kabupaten konservasi secara perlahan-lahan terbuka lebar melalui hadirnya regulasi dimaksud.

- c. Kabupaten Tambrauw memiliki nilai objek wisata yang berpotensi menjadi destinasi wisata. Dengan cakupan 29 distrik dan 216 Kampung, Kabupaten Tambrauw menyimpan potensi objek wisata yang tak kalah menarik. Beberapa site potensi wisata dimaksud antara lain : hamparan ekosistem alang-alang (*savanna*) membentang luas pada Lembah Kebar mencakup 19.000 ha sekaligus sebagai habitat bermain satwa rusa (*Cervus timorensis*), sumber air panas alam di Kampung Atai Kebar; Hutan Arboretum Damar Kebar dan Lokasi habitat tanaman rumput penyubur kandungan wanita Banondit (*Biophytum peterzianum*), Air Terjun Kampung Siakwa Miyah, Habitat Bermain Burung Cenderawasih di Kampung Weyos, Ases, Miyah, Tabamsereh, Habitat Peneluran Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*) di Taman Pesisir Jee Woomom Distrik Abun, Wisata Religi Pulau Dua (RIPPDA, Tambrauw 2016). Keberadaan obyek ini telah menjadi sasaran dikunjungi oleh sekelompok wisatawan lokal maupun mancanegara setiap bulan. Dengan demikian memiliki arti strategis untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berkelanjutan di Kabupaten Tambrauw.

Strategi W-O (Weaknesses and Opportunities)

- a. Meningkatkan persepsi dan sikap pada aparat organisasi perangkat daerah (OPD) terlebih dahulu terkait kebijakan Kabupaten Konservasi. Meningkatkan pengetahuan dapat dilakukan melalui sosialisasi, seminar dan maupun forum lainnya. Isu konservasi di

Kabupaten Tambrauw cukup *trend*, sehingga 'mentrigger' ruang kerjasama dan dukungan lembaga swadaya masyarakat dan pihak lain cukup banyak di Kabupaten Tambrauw. Kemitraan dan kerjasama ini menjadi peluang untuk meningkatkan pemahaman dasar kebijakan Kabupaten konservasi. Kebijakan mengenai kabupaten konservasi perlu dibangun pada tataran OPD dan masyarakat adat. Adanya seminar maupun forum lainnya guna mencari solusi agar kabupaten konservasi kedepannya dapat berjalan berdasarkan prinsip kabupaten konservasi yang dapat diartikan dalam 3 (tiga) aspek, yaitu: 1) sebagai suatu wilayah kabupaten yang memiliki kesatuan ekosistem serta aktivitas pembangunannya mengadopsi konsep konservasi sumberdaya alam, baik di dalam, maupun di luar kawasan konservasi; 2) pemanfaatan sumberdaya alam mengadopsi prinsip pengelolaan sumberdaya alam secara lestari; 3) melakukan restorasi dan rehabilitasi ekosistem untuk memulihkan fungsi dari ekosistem tersebut, dan untuk memanfaatkan peluang agar dapat menambah pendapatan daerah juga masyarakat sekitar. Upaya pendampingan maupun pelatihan seperti pemanfaatan sumberdaya alam dengan menawarkan potensi wisata, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu serta skema lainnya bagi pendapatan daerah dan meningkatkan perekonomian masyarakat perlu didorong untuk memperkecil dikotomi antara ekonomi dan konservasi.

- b. Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, PP. 44 Tahun 2004 dan PP. 6 Tahun 2007 Jo. PP 3 Tahun 2008 tentang pengelolaan hutan ditingkat provinsi, Kabupaten /Kota maupun ditingkat tapak memandatkan bahwa pembentukan wilayah pengelolaan hutan berbarengi dengan kesiapan masyarakat adat sebagai kelompok sosial yang memiliki hak dan akses terhadap hutan (Suharjito, 2017). Menurut informan 2 dan 22, bahwa pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat Kabupaten/kota maupun tingkat tapak sebagai amanat UU 23/2014, dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, aspirasi, kearifan tradisional, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi pemerintahan. Dengan demikian, peluang ini perlu di respon dengan mendorong penataan

dan pembentukan kelembagaan adat masyarakat. Kelembagaan ini dimaksudkan sebagai "unity" dalam memperoleh pengakuan (legitimasi) dan kewenangan untuk mengembangkan bisnis dalam pengelolaan hutan. Terbentuknya kelembagaan adat akan mampu mendorong kelompok-kelompok usaha hutan kelola masyarakat adat yang memiliki rencana kerja jangka panjang, berkelanjutan dan mendorong peningkatan ekonomi sejalan kelestarian ditingkat wilayah adatnya/tapak.

- c. Kawasan Konservasi secara aturan menjadi wewenang Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA) sebagai perpanjangan tangan institusi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, salah satu fungsinya sebagai pengelola kawasan Cagar Alam. Di kabupaten Tambrauw terdapat kawasan Cagar Alam Tambrauw Utara dan Cagar Alam Tambrauw Selatan. Kedua *reserve* ini sangat strategis menjadi destinasi wisata, sehingga perlu adanya pengawasan dan kontrol oleh BBKSDA dalam upaya pengelolaannya. Mengingat perkembangan pembangunan dan keterbukaan akses jalan kabupaten hingga trans nasional mendorong terjadinya *ekstraksi illegal* pada tumbuhan dan satwa liar. Berdasarkan data lapangan dan terkonfirmasi dari informan masyarakat adat nomor 44,45,53 dan 63, terdapat beberapa oknum masyarakat bahkan aparat keamanan (TNI/POLRI) yang terlibat menjual satwa yang dilindungi berupa Cenderawasih Kuning-Besar (*Paradisea apoda*) kepada wisatawan lokal yang sering berkunjung di Kabupaten Tambrauw. Motif ekonomi menjadi alasan klasik dibalik transaksi illegal tersebut. Masyarakat menjual satwa langka tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Fakta ini mengindikasikan bahwa peran dari BBKSDA perlu ditingkatkan dalam mengawal upaya perlindungan dan pelestarian terhadap satwa endemic bahkan menawarkan program alternative bagi masyarakat lokal. Dengan demikian beberapa langkah seperti *pre-emptif*, langkah *preventif*, langkah *represif* dan langkah *pemulihan* dapat dilakukan oleh BBKSDA sebagai insititusi yang bertanggungjawab langsung (Wahono, 2016). Langkah-langkah diatas sangat diperlukan agar kedepanya kawasan-kawasan konservasi yang berpotensi sebagai destinasi wisata terjaga kelestariannya. Meskipun demikian, perlu disadari bahwa konflik

ekonomi dan program konservasi sering berbenturan. Program kemitraan kehutanan, kemitraan konservasi maupun paket wisata alam berupa *bird watching* perlu didorong untuk mengatasi masalah diatas serta memberikan insentif bagi masyarakat asli setempat. Zakiyyah *et al.* (2016) menerangkan bahwa untuk mengubah sikap masyarakat diperlukan dua proses, pertama proses dimana masyarakat menanggapi berbagai isyarat yang mendasar dan heuristik dalam suatu kondisi serta kedua yakni masyarakat menanggapi informasi terhadap sikap yang relevan yang dihasilkan dari suatu kondisi.

Strategi S-T (Strenghts and Threath)

- a. Keberadaan kawasan konservasi yang sangat luas dimana hampir 77-80 % total wilayah administrasi Kabupaten Tambrauw merupakan kawasan konservasi. Hal ini memberi makna bahwa potensi keanekaragaman hayati wilayah ini sangat tinggi. Berdasarkan informasi wawancara pada informan 42, 49, 57 dan 61 di kampung-kampung sampel penelitian mengatakan bahwa sering terjadinya pencurian satwa yang dilindungi seperti burung cenderawasih (*Paradisea spp*), Rusa (*Cervus timorensis*) serta tumbuhan seperti anggrek hitam (*Ceologyne pandurata*) oleh oknum-oknum di luar Kabupaten Tambrauw. Aktivitas ini sangat meresahkan masyarakat adat di Kabupaten Tambrauw, sehingga desakan terus bergulir agar pemerintah Kabupaten Tambrauw menerbitkan regulasi daerah terkait pelarangan perburuan satwa dan tumbuhan illegal diwilayah hukum Kabupaten Tambrauw. Guna memperkuat basis legal regulasi kabupaten atas sumberdaya alam, maka peraturan kampung harus menjadi pijakan pembentukan regulasi dimaksud ditingkat atas. Proses pembentukan peraturan kampung harusnya dilakukan melalui mekanisme musyawarah kampung dan sosialisasi proses pembentukannya. Tugas pemerintah baik kabupaten, distrik dan kampung yakni memfasilitasi mekanisme pembentukan peraturan kampung melalui musyawarah kampung atas keterlibatan masyarakat dan tokoh adat serta mengakomodir hasil musyawarah tersebut menjadi peraturan bupati ataupun Perda yang nantinya akan menjadi payung hukum bagi semua pihak. Kekuatan dan semangat konservasi yang telah ditetapkan di Kabupaten Tambrauw,

diyakini menjadi modal utama dalam memperkecil terjadinya perburuan illegal tumbuhan dan satwa liar. Ancaman ini dapat tertutupi melalui tersedianya regulasi kabupaten maupun kemitraan Pemerintah Kabupaten Tambrauw bersama TNI-POLRI-BBKSDA. Selama proses pengambilan data lapangan, diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Tambrauw sedang membangun kerangka kerja dan kesepakatan bersama TNI-POLRI dan BBKSDA guna pencegahan kerusakan hutan, perburuan illegal tumbuhan dan satwa liar di wilayah hukum Kabupaten Tambrauw.

- b. Kawasan konservasi di Kabupaten Tambrauw sekitar 80-77% dari wilayah administrasi pemerintahan. Cakupan ini antara lain; Kawasan Suaka Alam /Kawasan Pelestarian Alam sekitar 61,339 Ha, Hutan Lindung 31,8769 Ha dari luasan Kabupaten Tambrauw Kawasan konservasi memiliki fungsi yang sangat penting yaitu sebagai sebuah sistem penyangga kehidupan. Meski demikian, karakteristik biologis dan kepentingan pengelolaannya yang kompleks menyebabkan selama ini kawasan konservasi belum dikelola secara efektif sehingga mengalami kerusakan secara terus menerus. Nordiansyah *et al* (2016) mengatakan bahwa evaluasi efektivitas pengelolaan dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek dalam siklus pengelolaan yaitu: perencanaan, masukan, proses, dan keluaran. Setiap aspek merupakan kumpulan komponen pengelolaan. Sebagaimana dimaksud dari aspek-aspek tersebut sangat berperan penting guna dalam pengambilan keputusan, sehingga perlu mendapat pertimbangan khusus. Keberpihakan Negara melalui hadirnya program perhutanan sosial maupun reforma agraria menjadi pintu masuk bagi pemberdayaan masyarakat adat. Di Tanah Papua, tanah, air, sungai, hutan dan lahan telah menjadi bagian dari kepemilikan masyarakat adat. Hal ini berarti bahwa, ruang kelola masyarakat adat perlu diprioritaskan dalam mengoptimalkan pengelolaan kawasan konservasi. Di Kabupaten Tambrauw terdapat 5 suku besar yang memiliki wilayah adat. Selama proses penelitian, diketahui bahwa 5 (lima) wilayah adat tersebut telah terpetakan secara indikatif. Menurut informan 31, 32, 33, 34 dan 35, meski masih bersifat indikasi, namun informasi awal berupa jumlah marga, keret, tempat penting masyarakat adat telah terpetakan. Dengan demikian akan menjadi kekuatan dalam mendukung program konservasi jika sinergitas bersama kelompok

adat tersebut terus dibangun. Kerjasama dan komunikasi yang efektif antara masyarakat adat, pengelola kawasan bersama pemerintah daerah akan menjadi 'area' yang mendukung pengelolaan kawasan konservasi karena kesamaan dan keseimbangan kepentingan (Marina dan Dharmawan, 2011).

- c. Seiring berjalannya waktu, eksistensi kearifan lokal dan budaya di Kabupaten Tambrauw setidaknya tengah berada pada kondisi yang mengarah pada kelunturan atau degradasi sosial-budaya. Penetrasi global yang tidak mengenal dimensi ruang dan waktu dapat dikatakan telah membawa cerita baru dalam perkembangan tatanan budaya di Kabupaten Tambrauw, diantaranya pendidikan adat yang dalam bahasa lokal disebut (*Wuon Woffle*). Pendidikan ini bertujuan mengajarkan pemahaman adat, alam, penghormatan terhadap alam, kepercayaan, budaya resiprositas dan kerjasama. Sebagaimana penjelasan informan 38 dan 39 bahwa, orang yang bersekolah adat disebut "*Wuon*" yang akan berada di hutan selama 6-12 bulan. Hutan, alam, air, sungai, gunung dan batu maupun tumbuhan dan satwa diposisikan sebagai leluhur yang harus dihormati. Sehingga penting untuk dijaga dan dihargai. Budaya ini telah membentuk tatanan kehidupan orang Tambrauw sehingga dijadikan sebagai kearifan local. Kearifan lokal dimaknai sebagai pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka (Fajarini, 2014; Ungirwalu *et al*, 2016). Dalam komunitas masyarakat adat, kearifan tradisional diwujudkan dalam bentuk seperangkat aturan, pengetahuan, keterampilan serta tata nilai dan etika yang mengatur tatanan sosial komunitas yang terus hidup dan berkembang dari generasi ke generasi (Thamrin 2013) dalam (Lake *et al*. 2017). Berdasarkan informasi yang diambil dari responden masyarakat adat, diketahui bahwa sekolah adat (*wuon woffle*), mengalami ancaman degradasi globalisasi serta beberapa tokoh agama menganggap masih erat dengan animisme. Hal ini berbanding terbalik dalam konteks konservasi dan ekowisata. Dalam konteks konservasi dan ekowisata, kearifan lokal bukan saja menjadi alat dalam menjaga kelestarian hidup, melainkan juga sebagai *platform* dalam memperkuat keharmonisan

ekologis serta keunikan sumberdaya untuk menstimulasi keberlanjutan kearifan lokal itu sendiri (Fatem et al, 2014). Selain itu, berbagai kearifan lokal yang kian terdegradasi atau sudah tidak dikenal, akan terrevitalisasi kembali seiring meluasnya permintaan atraksi ekowisata. Salah satu solusi untuk mengatasi ancaman seperti ini melalui pembentukan regulasi bagi upaya perlindungan kearifan lokal masyarakat Tambrauw. Unsur estetika dan seni yang terungkap diatas dapat dijadikan sebagai obyek wisata minat khusus. Pemerintah Daerah dapat mendorong terbentuknya kelompok sadar wisata yang dibina langsung dalam menyelenggarakan paket wisata sesuai karakteristik unggulan tiap kampung dan distrik wilayah Tambrauw. Mereka dapat teragregasi melalui kelompok pemandu wisata maupun masyarakat adat yang menyiapkan dan menawarkan layanan wisata alam baik minat khusus maupun minat umum. Program festival seni dan budaya adat Tambrauw penting untuk lakukan setiap tahun sebagai ajang promosi adat, budaya dan seni guna peningkatan ekonomi daerah.

Strategi W-T (Weaknesses and Threat)

- a. Kabupaten Tambrauw dicanangkan sebagai kabupaten konservasi berdasarkan visi dan misi dari Bupati Kabupaten Tambrauw pada butir ke lima ***“Menjaga lingkungan dengan menetapkan Tambrauw Sebagai Kabupaten Konservasi”***. Tak heran jika komitmen pemerintah daerah ingin menjadikan Kabupaten Tambrauw sebagai kabupaten konservasi dikarenakan fungsi hutan Kabupaten Tambrauw hampir mencapai 80% dari total wilayah administratif pemerintahan. Misi kabupaten konservasi merupakan misi yang tidak mudah terimplementasikan, karena menyangkut perubahan tatakelola sebagaimana mana disampaikan oleh informan 7 dalam wawancara penelitian. Perubahan tatakelola dapat dilakukan melalui proses penataan kembali (*re-inventing*). Proses penataan kembali hanya bisa dilakukan jika organisasi penggerak yakni aparat organisasi perangkat daerah dan masyarakat memiliki kapasitas dalam menterjemahkan misi dari pemerintah Kabupaten Tambrauw dimaksud. Dengan demikian penguatan kapasitas menjadi penting dalam mengawal pembentukan Kabupaten Konservasi. Nitiwijaya (2015) mentakan bahwa tugas, pokok dan fungsi dinas dilihat dari persepsi birokrasi dimana

peran OPD sangat dibutuhkan dengan beberapa aspek: sikap terhadap kebijakan kabupaten konservasi, pemahaman yang benar terhadap konsep kabupaten konservasi, peran aktif OPD terhadap implementasi kabupaten konservasi dan frekuensi program dukungan OPD bagi kabupaten konservasi. Hasil diskusi selama pengambilan data, dijumpai bahwa misi kabupaten konservasi pada tataran OPD di Kabupaten Tambrauw masih kurang dipahami. Umumnya misi Kabupaten konservasi hanya dipahami pada tataran *top level*, sebaliknya *supporting* sistem belum memahami kebijakan dimaksud. Dengan demikian peningkatan pemahaman kepada OPD di Kabupaten Tambrauw mutlak dilakukan. Selanjutnya, pada level masyarakat adat pun demikian, kebijakan Kabupaten Konservasi belum dipahami baik, sehingga membutuhkan proses. Padahal masyarakat adat menjadi pilar utama dari pembangunan konservasi melalui kearifan lokal mereka. Konservasi modern harus bisa disinergikan dengan kearifan lokal, sehingga saling mendukung dalam upaya konservasi. Hal ini sejalan dengan Escobar, 1996; Brosius 1997; Li 2002 dan Darmanto 2011 bahwa wacana konservasi bukanlah wacana netral dan muncul dari ruang hampa. Wacana konservasi sangat terkait erat dengan aspek kekuasaan, produksi dan makna baik tingkat global dan lokal. Setiap aktor akan mendefinisikan konservasi pada tataran yang berbeda-beda. Artikulasi ini mendorong terjadinya ruang relasi sosial antar para aktor dan povernya (Prabowo et al., 2016; Maryudi & Sahide, 2017)

- b. Peran kelembagaan adat dalam pengelola kawasan konservasi sangat vital. Karena implementasi Kabupaten konservasi membutuhkan partisipasi dan gerakan semua elemen masyarakat adat. Selain kelembagaan adat, kelembagaan pemerintah pun perlu dibenahi dalam mewujudkan implementasi Kabupaten Konservasi. Komitmen politik Kabupaten Konservasi mensyaratkan penataan tatakelola baik kelembagaan adat maupun kelembagaan pemerintah. Kelembagaan adat perlu dilakukan agar masyarakat memiliki ruang dan organisasi untuk berpartisipasi dalam mendukung kebijakan kabupaten konservasi. Kelembagaan pemerintah dapat berupa sistem aliran informasi dan perencanaan pembangunan, regulasi maupun sumberdaya manusia. Sementara kelembagaan adat dapat berupa kearifan lokal, sanksi, aturan adat serta organisasi adat itu sendiri. Penelitian ini

menemukan bahwa kelembagaan adat di kabupaten Tambrauw cukup baik dalam mengawal aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal. Hasil wawancara bersama pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal di Kabupaten Tambrauw seperti Yayasan Akawuon dan Yayasan Marwasnath, menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan masyarakat adat berkaitan dengan tanah, hutan, air dan manusia menjadi fokus yang secara bertahap dilakukan oleh masyarakat adat. Kedua lembaga ini merupakan anak-anak muda yang terdorong kerja-kerja pemetaan suku, marga dan tempat penting, potensi dan nilai sumberdaya alam di wilayah adat di kabupaten Tambrauw. Mereka telah mendampingi pelaksanaan Musyawarah Adat (MUSDAT) pada suku Mpur dan Abun dalam menyelesaikan batas-batas wilayah adat. Ke depannya, terdapat beberapa suku yang telah menjadi agenda kerja mereka dalam melakukan musyawarah adat baik suku Miyah, Iρες maupun suku Mooi Kelim. Agregasi dari kerja-kerja pemetaan masyarakat adat ini akan bermuara pada Perda Kabupaten Konservasi dan Perda Masyarakat adat maupun kelembagaan adat suku yang ada di kabupaten Tambrauw. Peran pemerintah dapat dilakukan melalui fasilitasi proses musyawarah adat (MUSDAT). Hasil musyawarah adat akan menjadi acuan bagi pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Tambrauw. Dengan mendorong penataan kembali dan legitimasi kelembagaan adat maupun kelembagaan pemerintah, maka secara perlahan-lahan masyarakat adat maupun pemerintah daerah akan memahami peran dan posisinya dalam menyikapi dinamika pembangunan dan perubahan kebijakan, khususnya konservasi sumberdaya alam dan lingkungan (Pudyatmoko et al, 2018).

- c. Salah satunya tugas UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah melalui BBKSDA yakni penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam, serta pelaksanaan perlindungan dan pengamanannya. Berdasarkan informasi yang diambil dari tiap kampung sampel penelitian, diketahui bahwa aspek pengawasan dan pengamanan kawasan di Kabupaten Tambrauw sangat minim bahkan jarang dilaksanakan. Tingginya kejadian perburuan liar, pencurian satwa dan tumbuhan memberikan makna bahwa fungsi perencanaan dan pengawasan BBKSDA masih sangat kurang (Asem et al 2011). Kondisi ini secara tidak langsung mendorong

kearifan lokal masyarakat perlahan mulai hilang. Budaya masyarakat yang dulunya berburu menggunakan jerat, tombak dan panah serta bantuan anjing berburu mulai kurang. Masyarakat lebih memilih berburu menggunakan senapan angin, karena dianggap akan mendapat hewan buruan semakin cepat serta jumlah yang banyak. Penggunaan senapan angin ini tentunya bukan tradisi masyarakat sekitar tetapi tradisi berburu moderen, yang dibawa oleh oknum-oknum luar yang masuk dalam tata kehidupan masyarakat sehingga mempengaruhi masyarakat untuk mengikutinya. Hal ini tentunya membawa dampak buruk terhadap keterancaman tumbuhan dan satwa. Dengan demikian dibutuhkan perencanaan dan pengawasan dari aktor BBKSDA lebih ekstra ketat untuk meminimalkan kelemahan ini. Salahsatu melalui pembangunan pos-pos jaga dan menambah satuan polisi kehutanan (POLHUT) sekitar kawasan konservasi. Selanjutnya mendorong program strategis lainnya seperti peningkatan bina cinta alam, penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Menurut informan 40, pemberdayaan masyarakat dalam dan sekitar kawasan konservasi berbasis kearifan lokal seperti pembentukan kampung adat, karya seni dan budaya, penyediaan sanggar ukiran dan anyaman dapat berperan mencegah degradasi pengetahuan dan kearifan lokal serta pergeseran budaya dalam berburu dan meramu sumberdaya alam maupun kesenian.

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis SWOT, diketahui bahwa Komitmen politik Tambrauw sebagai Kabupaten konservasi dapat dilakukan melalui proses deklarasi dan implementasi. Hal ini ditunjukkan melalui nilai S dan O sangat besar dibandingkan W dan T dan berada pada posisi kuadran I. Artinya bahwa situasi yang menguntungkan, untuk menjadikan Tambrauw sebagai kabupaten konservasi. Secara internal pembentukan Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi memiliki kekuatan besar. Kekuatan ini ditunjukkan melalui nilai Evaluasi faktor internal sebesar 3.20. Sebaliknya kelemahan pada faktor internal seperti rendahnya pengetahuan OPD dan Masyarakat terkait kebijakan Kabupaten Konservasi, kelembagaan adat belum tertata baik serta minimnya fungsi kontrol oleh BBKSDA terhadap kawasan konservasi akan tertutupi melalui peluang yang akan dikembangkan.

Sementara hasil analisis faktor eksternal pembentukan Kabupaten Konservasi, diketahui memiliki nilai 2.75.

Berdasarkan nilai tersebut dapat dikatakan bahwa pembentukan Tamberau sebagai Kabupaten Konservasi akan memperoleh manfaat optimal dari peluang, meski memiliki keterancaman yang dihadapinya. Keterancaman tersebut dapat diperkecil melalui 4 pilihan strategi. Pilihan strategi yang dimaksud antara lain: 1) **Strategi S-O (Strength and Opportunities)**. Dilakukan dengan optimalisasi komitmen politik pemerintah daerah melalui peningkatan pengelolaan potensi daerah; optimalisasi luas kawasan konservasi di Kabupaten Tamberau; pengendalian potensi ekowisata Kabupaten Tamberau. 2) **Strategi W-O (Weaknesses and Opportunities)**. Strategi ini dilakukan melalui: Peningkatan kapasitas OPD

dan Masyarakat adat tentang kebijakan Kabupaten Konservasi; Penataan kembali kelembagaan pemerintah dan kelembagaan adat maupun pengembangan ekonomi alternative dikawasan konservasi. 3) **Strategi S-T (Strengths and Threats)**. Pilihan strategi ini dilakukan melalui tersedianya regulasi tentang pelarangan perburuan illegal tumbuhan dan satwa di Kabupaten Tamberau; Keterlibatan penuh masyarakat dalam manajemen kawasan konservasi, meregulasi kearifan lokal yang ada dikabupaten Tamberau. 4) **Strategi W-T (Weaknesses and Threats)**. Strategi ini dilakukan melalui sosialisasi, diseminasi maupun advokasi pada tingkatan pemerintah Kabupaten maupun masyarakat adat; penataan kembali kelembagaan adat lokal serta optimalisasi peran Balai Konservasi Sumberdaya Alam Papua Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Actor-Centred Power (ACP): The importance of understanding the effect of changes in polity for the measurement of power dynamics over time. *Forest Policy and Economics*, 62, 184-186. doi: <http://doi.org/10.1016/j.forpol.2015.10.006>.
- Angi, E.M., 2005. Kebijakan Pemerintah Pusat di Bidang Konservasi dari Perspektif Daerah dan Masyarakat. Center for International Forestry Research. Jakarta.
- Anonim, 2016. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial. Kantor Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Anonim, 2017. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 43 tahun 2017 Tentang Perhutanan Sosial. Kantor Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Asem, G., Kahisiuw P., Fatem, S.M., Runtuboy, Y., Marwa, J., 2011. Prospect of Tamberau as Conservation Regency in West Papua (A Preliminary Analysis). In: M. Taufik Fauzi, Komang Damar Jaya, Hoi Sen Yong, Miko Krisbaucm, M. Sarjan, Lestari Ujianto, Siti Latifa, Baiq Dewi Krisdayanti, editor. *Significance of Climate Change on Biodiversity in Sustaining the Globe. Proceeding of the 2nd International Conference on Biodiversity*. Universitas Mataram, Mataram, 2-4 July 2013.
- Asem, G., Fatem, S., 2017. Integrasi Isu Masyarakat Adat dan Konservasi ke dalam Tata Kelola Pemerintah melalui Kabupaten Konservasi. Materi dalam Seminar Nasional PKMRI Provinsi Papua Barat. 22 Juni 2017
- Avenzora, R., Harnios, A., 2017. Khazanah Kearifan Lokal dalam Memperkuat Konservasi dan Ekowisata: Studi Kasus Masyarakat Adat Dawan di Kabupaten Timor Tengah Utara. *Media Konservasi* Vol. 22 No. 3 Desember 2017: 213-219.
- Bappeda Tamberau, 2011. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tamberau.
- Bappeda Tamberau, 2014. Rencana Tata Ruang Wilayah Revisi Kabupaten Tamberau.
- [BKSDA PB] Balai Konservasi Sumberdaya Alam Papua Barat, 2013. Buku Informasi Kawasan Konservasi di Papua Barat.
- Brosius, J.P., 1997. Green dots, pink heart. Displacing politic from the Malasyan Rain Forest. *American Anthropologis* 101: 36-57.
- Darmanto, 2014. Konservasi Global, Taman Nasional dan Praktek Lokal di Pulau Siberut, Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Kehutanan*. Volume V. No 1. Januari –Maret 2014.
- Dinas Pariwisata Tamberau. 2016. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Tamberau.
- Dwijayati, A.K., Suprpto, D., Rudiyaniti, S., 2016. Identifikasi Potensi Dan Strategi Pengembangan Ekowisata Pada Kawasan Konservasi Hutan Mangrove Desa Pasar Banggi Kabupaten Remban. *Diponegoro Journal Of Maquares* Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, Halaman: 328-336
- Escobar, A., 1998. Whose knowledge, whose nature? Biodiversity, conservation, and the

- political ecology of social movements. *Journal of Political Ecology*, 5(1), pp.53-82
- Fateme, S., Asem, G., 2015. 'Kabupaten konservasi sebagai political action pemerintah daerah dalam mendukung konservasi sumberdaya alam hayati: Studi kasus Kabupaten Tambrauw, Papua Barat' dalam *PROS SEM NAS MASY BIODIV INDON*. Volume 1, Nomor 5, September 2015. Hlm. 1403-1410. Volume 1, DOI: 10.13057/psnmbi/m0105xx.
- Jepson, P., Whittaker, R.J., 2002. Histories of Protected Area; Internationalization of Conservationist Values and their Adoption in the Netherlands Indies (Indonesia)". *Environment and History* 8:129-172.
- Kartika, S. N., Mashal, A. J., Beehler, B.M., 2007. *Seri Ekologi Indonesia jilid IV: Ekologi Papua Yayasan Obor Indonesia*. Jakarta.
- MacKinnon, J.K. *et al.*, 1993. *Pengelolaan kawasan yang dilindungi di daerah tropika*, Yogyakarta: GadjahMada University Press.
- Marina, I., Dharmawan, A.H., 2011. *Analisis Konflik Sumberdaya Hutan di Kawasan Konservasi*. *Sodality-Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*. ISSN: 1978-4333, Volume 05, No. 01 April 2011
- Maryudi, A., Sahide, M.A.K., 2017. Research trend: Power analyses in polycentric and multilevel forest governance. *Forest Policy and Economics*, 81, pp.65-68.
- Muttaqin, T., Purwanto, R. H., Rufiqo, S. N., 2011. Kajian potensi dan strategi pengembangan ekowisata di cagar alam Pulau Sempu Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. <http://ejournal.ac.id/index.php/gamma/article/view/1433>
- Nitiwijaya, Y. S., 2015. Persepsi birokrat terhadap pemberdayaan ekonomi berbasis kelestarian lingkungan di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Agrijati* 28 No, 1 April 2015.
- Nordiansyah, H., Ismail, Ismail, B., 2016. Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Kawasan Cagar Alam Padang Luway Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal AGIRIFOR* Volume XV Nomor 1, Maret 1 2016.
- Petocz, R.G., 1989. *Konservasi Alam dan Pembangunan di Irian Jaya*. Grafiti press. Jakarta.
- Prabowo, D., Maryudi, A., Imron, M. A., Senawi, 2016. Enhancing the application of Krott *et al.*'s (2014).
- Pudyatmoko, S., Budiman, A., Kristiansen, S., 2018. Towards sustainable coexistence: People and wild mammals in Baluran National Park, Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 90, pp.151-159.
- Purwanto, S., Lailan, S., Gunawan, A., 2014. Kajian Potensi dan Daya Dukung Taman Wisata Alam Bukit Kelam untuk Strategi Pengembangan Ekowisata. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* Vol. 4 No. 2 (Desember 2014): 119-12.
- Rangkuti, F., 1997. *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT*. PT Gramedia Pustaka Utama, Anggota IKAPI. Jakarta.
- Setiawan, A., Alikodra, H., 2001. Tinjauan Terhadap Pembangunan Sistem Kawasan Konservasi di Indonesia. *Media Konservasi* Vol. VII, No.2 Juni 2001. Hal 39-46.
- Soemarwoto, O., 2004. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Djambatan, Jakarta.
- Suharjito, D., 2017. *Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kebijakan, Implementasi dan Masa Depan*. *Multistakeholder Forestry Programme 3 (MFP3) dan Dewan Kehutanan (DKN)*.
- Sumedi, N., Simon, H., Djuwantoko., 2012. Strategi pengelolaan pegunungan Jawa: Studi kasus Pegunungan Dieng Jawa Tengah, Indonesia. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea* Vol.1 No.1, Agustus 2012: 36 - 4.
- Suryandari, E.Y., Sylviani, 2012. Kajian Implementasi Kebijakan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Di Daerah (Studi Kasus KPH Banjar, Kalimantan Selatan Dan KPH Lalan Mangsang Mendis, Sumatera Selatan). Vol. 996.2. Agustus 2012: 114-130.
- Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kantor Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta. 4 Maret 1999.
- Ungirwalu A., Awang SA., Maryudi A., Suryanto, P., 2016. Pengelolaan Adaptif Pemanfaatan Buah Hitam (*Haplolobus monticola* Blumea) Etnis Wandamen-Papua (*Adaptive Management Utilization of Black Fruit (Haplolobus monticola* Blumea) Ethnic Wandamen-Papua. *J. Manusia dan Lingkungan*, Vol. 23, No.2, Juli 2016: 266-275
- Wahono, R., 2016. Peran Balai Konservasi SumberDaya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta (BKSDA Daerah Istimewa Jogjakarta) dalam pengendalian terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi.
- Wikramanayake, E., Dinerstein, E., Loucks, C., Olson, D., Morrison, J., Lamoreux, J., McKnight, M., Hedao, P., 2001. *Terrestrial ecoregions of the Indo-Pacific: A conservation assessment*. Washington (DC): Island Press
- Wiratno, C., Indiroyo, S., Daru, K., 2004. Berkaca di Cermin Retak. Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi Pengelolaan Taman Nasional.

Jakarta: Forest Press, The Gibbon Foundation
Indonesia, Departemen Kehutanan, PILI-NGO
Movement.

Zakiyyaha, Ervival, A.M., Zuhud, Sumardjoc,
2016. Sikap masyarakat dan konservasi
kasus stimulus pakis sayur di Desa Gunung
Bunder II, Kecamatan Pamijahan, Bogor
Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan
Lingkungan Vol. 6 No. 1 (Juli 2016): 71-76

Lampiran 1. Informan Dalam Penelitian

Kode Informan	PEKERJAAN	Institusi	ALAMAT
1	PNS	Fakultas Kehutanan Unipa	Univeritas Papua Manokwari
2	PNS	BBKSDA Papua Barat	BBKSDA Papua Barat-Sorong
3	PNS	Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat	Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat ,Manokwari
4	PNS	Bidang Data dan Pelaporan , Dinas Kehutanan Papua Barat	Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Manokwari
5	PNS	Bappeda Papua Barat	Bappeda Papua Barat
6	PNS	Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat	Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat, Manokwari
7		Pemerintahan Kabupaten Tambrauw	Sausapor - Tambrauw
8	PNS	Dinas Pertanian Kab Tambrauw	Sausapor - Tambrauw
9		Perlindungan Tanaman Dinas Pertanian Tambrauw	Sausapor - Tambrauw
10	PNS	Pariwisata dan Kebudayaan Tambrauw	Sausapor - Tambrauw
11	PNS	Dinas Lingkungan Hidup Tambrauw	Sausapor - Tambrauw
12	PNS	Lingkungan Hidup Tambrauw	Sausapor - Tambrauw
13	PNS	Dinas Lingkungan Hidup Tambrauw	Sausapor - Tambrauw
14	PNS	Dinas Pekerjaan Umum	Sausapor - Tambrauw
15	PNS	Pekerjaan Umum	Sausapor - Tambrauw
16	PNS	Bappeda Tambrauw	Sausapor - Tambrauw
17	PNS	Perencanaan Bappeda Tambrauw	Sausapor - Tambrauw
18	PNS	Bappeda Tambrauw	Sausapor - Tambrauw
19	PNS	Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu	Sausapor - Tambrauw
20	PNS	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu	Sausapor - Tambrauw
21	PNS	DKP Tambrauw	Sausapor - Tambrauw
22	PNS	CDK Wilayah 10 Tambrauw	Sausapor - Tambrauw
23	PNS	Pemerintahan Kabupaten Tambrauw	Sausapor - Tambrauw
24	PNS	Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Pariwisata Tambrauw	Sausapor - Tambrauw
25	PNS	DLH Tambrauw	Sausapor - Tambrauw
26	PNS	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Pariwisata Tambrauw	Sausapor - Tambrauw
27	PNS	Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Pariwisata Tambrauw	Sausapor - Tambrauw
28	PNS	DLH Tambrauw	Sausapor - Tambrauw
29	PNS	CDK Wilayah 10	Sausapor - Tambrauw

Kode Informan	PEKERJAAN	Institusi	ALAMAT
		Tambrau	
30	PNS	Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Pariwisata Tambrau	Sausapor - Tambrau
30 Orang Informan- PNS			
31	Swasta	Program Samdhana Institute untuk Papua	Sausapor - Tambrau
32	Swasta	Program WWF Sausapor	Sausapor - Tambrau
33	Swasta	Epistema Institute	Sausapor - Tambrau
34	Swasta	Yayasan Paradisea	Sausapor - Tambrau
35	Swasta	Yayasan Akawuon	Sausapor - Tambrau
36	Swasta	Yayasan Marwasnath	Sausapor - Tambrau
6 Orang Informan- LSM			
37	Swasta	Masyarakat	Sausapor - Tambrau
38	Swasta	Suku Miyah	Kampung Siekwa Distrik Miyah
39	Swasta	Suku Abun	Distrik Kwoor
40	Petani	Suku Mpur	Distrik Kebar
41	Petani	Suku Iρες	Distrik Iρες
42	Petani	Kampung Meinad	Kampung Meinad Distrik Iρες
43	Petani	Masyarakat	Kampung Meinad Distrik Iρες
44	Petani	Masyarakat	Kampung Meinad Distrik Iρες
45	Petani	Kampung Meis	Kampung Meis Distrik Iρες
46	Petani	Masyarakat	Kampung Meis Distrik Iρες
47	Petani	Aparat Kampung	Kampung Wasanggon Distrik Kebar
48	Petani	Baperkam	Kampung Wasanggon Distrik Kebar
49	Pelayan Gereja	Masyarakat	Kampung Jafai Distrik Kebar
50	Petani	Masyarakat	Kampung Jafai Distrik Kebar
51	Petani	Masyarakat	Kampung Ataf Mafat Distrik Wilhem Roubouts
52	Petani/IRT	Masyarakat	Kampung Ataf Mafat Distrik Wilhem Roubouts
53	Aparat Kampung	Kepala Kampung	Kampung Emaus Distrik Sausapor
54	Aparat Kampung	Kepala Kampung	Kampung Donan Distrik Sausapor
55	Petani	Masyarakat	Kampung Donan Distrik Sausapor
56	PNS	Masyarakat	Kampung Donan Distrik Sausapor
57	Petani	Masyarakat	Kampung Kwoor Distrik Kwoor
58	Petani	Masyarakat	Kampung Kwoor Distrik Kwoor
59	Petani	Masyarakat	Kampung Ayae Distrik Miyah
60	Petani	Masyarakat	Kampung Ayae Distrik Miyah
61	Petani/IRT	Masyarakat	Kampung Siakwa Distrik Miyah
62	Petani	Masyarakat	Kampung Siakwa Distrik Miyah
63	Petani	Masyarakat	Kampung Siakwa Distrik Miyah

Kode Informan	PEKERJAAN	Institusi	ALAMAT
64	Petani	Masyarakat	Kampung Arapi Distrik Senopi
65	Petani	Masyarakat	Kampung Arapi Distrik Senopi
66	Petani	Masyarakat	Kampung Arapi Distrik Senopi
67	Petani	Masyrakat	Kampung Aneti, Kebar Selatan
68	Petani	Masyarakat	Kampung Aneti, Kebar Selatan
69	Swasta	Masyarakat	Kampung Emaus, Sausapor
70	Petani	Masyarakat	Kampung Jokte ,Sausapor
71	Petani	Masyarakat	Kampung Jokte, Sausapor
72	Petani	Masyarakat	Kampung Bondoan, Sausapor
73	Petani	Masyarakat	Kampung Bondoan, Sausapor
74	Petani	Masyarakat	Kampung Bikar, Bikar
75	Petani	Masyarakat	Kampung Bikar, Bikar
76	Petani	Masyarakat	Kampung Bikar, Bikar
	40 Orang Informan- Masyarakat Tambrau		

Lampiran 2. Hasil Analisis Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor Internal									
No	Kekuatan (<i>Strenghts</i>)	NU	BF%	ND	NBD	NRK	NBK	TNB	FKK
1.	Luas wilayah 77% Kawasan konservasi	5	0,089	5	0,446	3,300	0,295	0,741	2
2.	Ketentuan Politik Pemerintah Daerah dalam visi dan misi	5	0,089	5	0,446	3,580	0,320	0,766	1
3.	Adanya pemberdayaan masyarakat oleh LSM dan NGO dalam melestarikan dan menjaga satwa yang dilindungi	3	0,054	4	0,214	2,730	0,146	0,361	
4.	Peran masyarakat dalam melarang perburuan satwa langka dan juga perburuan menggunakan senjata api	4	0,071	5	0,357	3,120	0,223	0,580	
5.	Adanya LSM/NGO yang bergerak dalam bidang lingkungan	3	0,054	4	0,214	2,910	0,156	0,370	
6.	Adat istiadat yang masih kental	4	0,071	4	0,286	3,150	0,225	0,511	
7.	Potensi wisata yang dapat dikelola menjadi objek wisata	4	0,071	5	0,357	3,180	0,227	0,584	3
8.	Adanya potensi HHBK yang dapat diolah menjadi obat-obatan, kerajinan tangan dan lainnya	4	0,071	5	0,357	3,000	0,214	0,571	
9.	Dikontrol Oleh BBKSDA	3	0,054	3	0,161	2,880	0,154	0,315	
10.	Hasil pertanian yang menunjang kehidupan masyarakat	4	0,071	4	0,286	2,720	0,194	0,480	
Total Faktor Kekuatan								5,279	

No	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	NU	BF%	ND	NBD	NRK	NBK	TNB	FKK
1.	Belum adanya sosialisasi terkait kabupaten Tambrauw.	1	0,018	1	0,018	3,850	0,069	0,087	
2.	Pengetahuan masyarakat &OPD masih kurang terkait kabupaten konservasi.	2	0,036	3	0,107	3,330	0,119	0,226	1
3.	Adanya Tambang Ilegal.	1	0,018	1	0,018	1,820	0,033	0,050	
4.	Kurangnya mutu pendidikan dan Kesehatan.	3	0,054	2	0,107	2,000	0,107	0,050	
5.	Kelembagaan adat yang belum terstruktur.	2	0,036	2	0,071	2,820	0,101	0,172	2
6.	Perambahan penduduk/perpindahan	2	0,036	1	0,036	2,790	0,100	0,135	

No	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	NU	BF%	ND	NBD	NRK	NBK	TNB	FKK
	penduduk.								
7.	Batas wilayah adat dan kampung yang belum jelas.	1	0,018	1	0,018	2,580	0,046	0,064	
8.	Degradasi kearifan lokal dan nilai budaya.	2	0,036	1	0,036	2,400	0,086	0,121	
9.	Belum adanya penetapan perda kabupaten konservasi.	1	0,018	3	0,054	2,970	0,053	0,107	
10.	Kurangnya pengawasan dan kontrol BBKSDA.	2	0,036	2	0,071	2,720	0,097	0,169	3
Total Faktot Kelemahan								1,181	
Total Faktor Internal								6,461	

Faktor Eksternal									
No	Peluang (<i>Opportunities</i>)	NU	BF%	ND	NBD	NRK	NBK	TNB	FKK
1.	Menjadi Perhatian LSM luar negeri dan dalam Negeri.	4	0,095	4	0,381	3,180	0,303	0,684	
2.	Menjadi destinasi wisata.	5	0,119	5	0,595	2,870	0,342	0,937	3
3.	Adanya kebijakan pembuatan KPHK (Kesatuan pengelolaan hutan Konservasi).	5	0,119	5	0,595	3,790	0,451	1,046	2
4.	Penghargaan dan intensif dari luar dan dalam negeri.	3	0,071	3	0,214	3,200	0,229	0,443	
5.	Pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah dalam menjaga lingkungan sekitar .	4	0,095	5	0,476	3,580	0,341	0,817	
6.	Potensi CSR di bidang lingkungan.	4	0,095	4	0,381	3,850	0,367	0,748	
7.	Menambah pendapatan daerah dari sektor wisata.	5	0,119	5	0,381	3,910	0,465	1,061	1
Total Faktor Peluang								5,735	

No	Ancaman (<i>Threath</i>)	NU	BF%	ND	NBD	NRK	NBK	TNB	FKK
1.	Investasi kelapa sawit,tambang dan HPH.	1	0,024	1	0,024	2,720	0,065	0,089	
2.	Ijin investasi pemerintah pusat tanpa melibatkan perintah daerah.	1	0,024	1	0,024	2,720	0,065	0,089	
3.	Degradasi kearifan lokal akibat era-globalisasi.	2	0,048	3	0,143	2,850	0,136	0,279	3
4.	Arus transmigrasi yang makin meningkat.	1	0,024	2	0,048	2,800	0,067	0,114	
5.	Ketimpangan ekonomi terakibat kebijakan.	1	0,024	2	0,048	3,150	0,075	0,123	
6.	Berubah-ubahnya kebijakan	3	0,071	3	0,214	3,060	0,219	0,433	2

No	Ancaman (<i>Threath</i>)	NU	BF%	ND	NBD	NRK	NBK	TNB	FKK
	pemerintah pusat.								
7.	Pencurian Satwa dan tumbuhan dari luar yang masuk kedalam.	3	0,071	4	0,286	2,730	0,195	0,481	1
Total Faktor Ancaman								1,600	
Total Faktor Ekternal								7,342	